POHON KINERJA
PUSAT KAJIAN DAERAH DAN ANGGARAN
DPD RI

Terwujudnya peran DPD RI sesuai aspirasi daerah
IK : Nilai aspirasi masyarakat dan daerah yang menjadi produk DPD RI

Meningkatnya kualitas legislasi RUU
IK : 1) Nilai kualitas RUU usulan DPD RI (usulan DPD) (X_1) ; 2) Nilai kualitas pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR (X_2); 3) Nilai kualitas pertimbangan atas RUU mengenai APBN (X_3); 4) Nilai kualitas pertimbangan atas RUU mengenai Pajak, Pendidikan dan Agama (X_4)

Meningkatnya kualitas pengawasan
IK : 1) Nilai kualitas hasil pengawasan sesuai ASMAKDA (X_5) ; 2) Nilai kualitas tindak lanjut hasil pemantauan dan pentinjauan terhadap pelaksanaan UU sesuai ASMAKDA (X_6) ; 3) Nilai kualitas tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Renperda dan Perda sesuai ASMAKDA (X_7)

PK Pimpinan Lembaga / Eselon Ia / Kinerja Strategis

Meningkatnya kualitas RUU inisiatif yang dihasilkan DPD RI
IK : 1) Nilai kualitas dukungan bahan untuk legislasi RUU ($P_{1.1}$) ; 2) Nilai kualitas dukungan keahlian untuk legislasi RUU ($P_{1.2}$)

Meningkatnya kualitas pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR
IK : 1) Nilai kualitas dukungan bahan untuk pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR ($P_{1.3}$) ; 2) Nilai kualitas dukungan keahlian untuk pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR ($P_{1.4}$)

Meningkatnya kualitas pertimbangan atas RUU Mengenai APBN
IK : 1) Nilai kualitas dukungan bahan untuk pertimbangan atas RUU mengenai APBN ($P_{1.5}$) 2) Nilai kualitas dukungan keahlian untuk pertimbangan atas RUU mengenai APBN ($P_{1.6}$)

Meningkatnya kualitas pertimbangan atas RUU Mengenai Pajak, Pendidikan dan Agama
IK : 1) Nilai kualitas dukungan bahan untuk pertimbangan atas RUU Pajak, Pendidikan dan Agama ($P_{1.7}$) 2) Nilai kualitas dukungan keahlian untuk pertimbangan atas RUU Pajak, Pendidikan dan Agama ($P_{1.8}$)

Meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan UU
IK : 1) Nilai kualitas dukungan bahan hasil pengawasan atas pelaksanaan UU sesuai ASMAKDA ($P_{1.9}$) 2) Nilai kualitas dukungan keahlian hasil pengawasan atas pelaksanaan UU sesuai ASMAKDA ($P_{1.10}$)

Meningkatnya kualitas tindaklanjut atas hasil pemantauan dan pentinjauan terhadap pelaksanaan UU sesuai ASMAKDA
IK : 1) Nilai kualitas dukungan bahan untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan pentinjauan terhadap pelaksanaan UU sesuai ASMAKDA ($P_{1.11}$) 2) Nilai kualitas dukungan keahlian untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan pentinjauan terhadap pelaksanaan UU sesuai ASMAKDA ($P_{1.12}$)

Meningkatnya kualitas tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Renperda dan Perda sesuai ASMAKDA
IK : 1) Nilai kualitas dukungan tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Renperda dan Perda sesuai ASMAKDA ($P_{1.13}$) 2) Nilai kualitas keahlian tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Renperda dan Perda sesuai ASMAKDA ($P_{1.14}$)

PK Eselon Ib/ Kinerja Taktis

Meningkatnya kualitas dukungan bahan untuk legislasi RUU
IK : 1) Nilai tertimbang dukungan bahan legislasi RUU sesuai standar yang ditetapkan ($K_{1.1}$)

Meningkatnya kualitas dukungan bahan untuk pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR
IK : 1) Nilai tertimbang dukungan bahan legislasi RUU Usul Pemerintah atau DPR sesuai standar yang ditetapkan($K_{1.2}$)

Meningkatnya kualitas dukungan bahan untuk pertimbangan atas RUU mengenai APBN
IK : 1) Nilai tertimbang dukungan bahan legislasi RUU sesuai standar yang ditetapkan ($K_{1.3}$)

Meningkatnya kualitas dukungan bahan untuk pertimbangan atas RUU mengenai Pajak, Pendidikan dan Agama
IK : 1) Nilai tertimbang dukungan bahan legislasi RUU sesuai standar yang ditetapkan ($K_{1.4}$)

Meningkatnya kualitas dukungan bahan untuk hasil pengawasan atas pelaksanaan UU sesuai ASMAKDA
IK : 1) Nilai tertimbang rekomendasi kebijakan atas tabulasi data ASMAKDA untuk pengawasan atas pelaksanaan UU sesuai standar yang ditetapkan ($K_{1.5}$)

Meningkatnya kualitas dukungan bahan untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan pentinjauan terhadap pelaksanaan UU sesuai ASMAKDA
IK : 1) Nilai tertimbang rekomendasi kebijakan atas tabulasi ASMAKDA untuk pemantauan dan pentinjauan sesuai standar yang ditetapkan ($K_{1.6}$)

PK Eselon II / Kinerja Operasional

Terhimpunnya aspirasi masyarakat dan daerah yang berkualitas untuk legislasi RUU
IK : 1) ASMAKDA oleh Anggota DPD RI; 2) ASMAKDA oleh Kaban DPD RI; 3) Pengajuan data aspirasi; 4) Kajian terkait dengan hubungan pusat dan daerah serta pelaksanaan otonomi daerah; 5) Konfirmasi otoritas/ahli

Tersusunnya rekomendasi kebijakan atas tabulasi data ASMAKDA untuk pandangan dan pendapat
IK : 1) Pengajuan data aspirasi; 2) Kajian terkait dengan hubungan pusat dan daerah serta pelaksanaan otonomi daerah; 3) Konfirmasi otoritas/ahli

Tersusunnya rekomendasi kebijakan atas tabulasi data ASMAKDA untuk Pertimbangan atas RUU APBN
IK : 1) Pengajuan data aspirasi; 2) Kajian terkait dengan hubungan pusat dan daerah serta pelaksanaan otonomi daerah; 3) Konfirmasi otoritas/ahli

Tersusunnya rekomendasi kebijakan atas tabulasi data ASMAKDA untuk Pertimbangan atas RUU mengenai Pajak, Pendidikan dan Agama
IK : 1) Pengajuan data aspirasi; 2) Kajian terkait dengan hubungan pusat dan daerah serta pelaksanaan otonomi daerah; 3) Konfirmasi otoritas/ahli

Tersusunnya rekomendasi kebijakan atas tabulasi data ASMAKDA untuk pengawasan atas pelaksanaan UU
IK : 1) Tabulasi ASMAKDA atas pelaksanaan UU terkenal; 2) Penetapan prioritas pengawasan atas ASMAKDA pelaksanaan UU terkenal

Tersusunnya rekomendasi kebijakan atas tabulasi data ASMAKDA untuk Pemantauan dan pentinjauan
IK : 1) Tabulasi ASMAKDA atas pelaksanaan UU terkenal; 2) Penetapan prioritas pengawasan atas ASMAKDA pelaksanaan UU terkenal

Output